

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Pembangunan secara umum yang dilakukan oleh suatu Negara itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Safitri (2016) menyatakan “Pasal 1 angka 2 dalam UU No.25 tahun 2004 tentang tentang sistem perencanaan pembangunan disebutkan bahwa pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan dalam semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Karena struktur yang paling dekat dengan masyarakat adalah desa, maka desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat. Menurut Ridlwan (2013) Tujuan pembangunan nasional di Indonesia sendiri merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Desa secara umum merupakan pembagian antar wilayah administratif Kecamatan yang dipimpin oleh Kades atau kepala desa. Menurut Kadjudju dan Morasa (2017) desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya ketegasan ekstensi desa agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pencapaian tujuan dari pembangunan nasional desa agen pemerintahlah yang mampu mencapai kelompok sasaran yang akan disejahterakan, yaitu dengan cara membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Menurut Ramadana dan Ribawanto (2013) menyatakan yang tertera di dalam permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, mengemukakan “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai segala kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan juga dapat menjadi peluang usaha atau meningkatkan lapangan pekerjaan serta menambah wawasan masyarakat desa, dan juga sebagai wadah untuk aktivitas perekonomian masyarakat desa. bumdes di katakan sebagai payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa, yang artinya bumdes dapat mewadahi segala aktivitas atau usaha perekonomian desa, serta mendorong masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di desa dapat meningkatkan bumdes yang dapat mewadahi segala usaha ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

asli daerah dalam pembangunan desa, dan meningkatkan potensi perekonomian di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Seperti yang di ungkapkan dalam penelitian Ramadana dan Ribawanto (2013) keberadaan bumdes yang ada di desa Landungsari masih belum memiliki kontribusi sebagai peningkatan perekonomian masyarakat desanya. Keberadaan badan usaha milik desa di desa landungsari diharapkan mampu mendukung serta mencapainya kemunculan kembali demokrasi sosial di desa Landungsari dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat desa tentang tata cara pengelolaan badan usaha milik desa secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa landungsari tidak berkurang.

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat pesat, maka akuntansi ikut serta berperan sebagai alat mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan yang semakin penting. Upaya global dalam menyelaraskan standar akuntansi telah berjalan dengan cepat pada asumsi bahwa system pelaporan keuangan didukung oleh pemerintahan yang kuat standar kualitas dan kerangka peraturan-peraturan adalah kunci untuk pembangunan ekonomi (Joshi dan Yapa, 2014). Menurut Othman dan Kossentini (2012) yang terjadi dari beberapa penelitian menyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan sistem efektif yang mencerminkan bagaimana kondisi dan dimana sebuah entitas beroperasi. Dalam penelitan Hope dan Jin (2006) menunjukkan bahwa keseragaman yang lebih besar dari standar akuntansi tidak mungkin untuk mencapai komparatif yang lebih besar dari laporan keuangan selama perbedaan dalam infrastruktur ekonomi dan politik dapat menentukan pelaporan keuangan dalam praktek sebenarnya.

Dalam penelitian Lang (2008) yang menyatakan bagaimana pentingnya penerapan IAS yang dalam penelitian dari perusahaan-perusahaan di 21 negara yang menerapkan IAS antara tahun 1994 dan 2003, sebagai contoh perbandingan perusahaan yang menerapkan IAS dengan perusahaan yang tidak menerapkan dan hasil dari penelitian kualitas laporan yang menggunakan IAS lebih tinggi kualitas laporan keuangannya, karena data mengatasi dan lebih memudahkan perusahaan dalam hal seperti kurangnya pengelolaan laba menuju target, pengakuan lebih tepat waktu dari kerugian, dan asosiasi yang lebih tinggi dari jumlah akuntansi dengan harga saham dan return. Adanya faktor-faktor seperti ukuran bisnis, perlindungan investor dan penegakan hukum yang menyiratkan adanya variasi pendapatan manajemen dan mungkin adanya ruang untuk manipulasi di bawah standar akuntansi internasional di bandingkan dengan standar akuntansi domestic (Uzma, 2016). Adanya standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas keuangan pelaporan karena juga meningkatkan entitas tetap transparansi diantara perusahaan yang terdaftar (Marzuki dan Wahab,2017).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar penyusunan laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011 tetapi penerapan diperbolehkan pada 1 Januari 2010, dengan adanya standar ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu indikator yang dilaksanakan sebagai penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada bumdes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. Menurut (Rudini dan Nurhayati, 2011) Ikatan Akuntan Indonesia (2012), menyatakan Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi, Neraca, Laporan Laba-Rugi , Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang

berisi ringkasan kebijakan Akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan masih banyak bumdes yang sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya karena dari beberapa masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa bumdes yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum ada ketentuan yang mengharuskan mengacu kepada SAK ETAP.

Hal ini di buktikan dalam penelitian Rudini dan Nurhayati (2011) dari laporan keuangan pada bumdes Langkitin hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Dari sekian banyak bumdes di Indonesia belum terlaksanakan oleh beberapa desa dan dalam penerapan laporan keuangannya masih ada yang belum menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan karena memang tidak adanya ketentuan pasti dalam penetapan standar kuangan yang harus digunakan untuk suatu bumdes. Maka penelitian ini mereplikasi dari penlitian Ramadana dan Ribawanto (2013) dan penelitian (Rudini dan Nurhayati (2011) yang dimana dari kedua penelitian tersebut penelitian ini menggabungkan dua penelitian yang dikarenakan dalam penelitian ini akan membahas bagaimana kondisi desa dengan keberadaan badan usaha milik desa dan bukan hanya akan membahas itu saja tetapi penelitian ini juga akan membahas bagaimana kondisi laporan keuangan bumdes dan apakah laporan keuangan bumdes dapat menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya.

Maka dalam penelitian ini akan membahas tentang **Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**. Jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya didalam penelitian ini akan membahas secara luas bukan hanya dari keberadaan BUMDes saja tetapi akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi dalam desa dari berbagai partisipasi masyarakat desanya dan juga mencari permasalahan atau faktor penghambat yang ada di BUMDes tersebut dan bagaimana pelaporan keuangannya apakah sudah menerapkan SAK ETAP yang berlaku, dan juga bagaimana pertanggungjawaban dari badan usaha milik desa dan bagaimana anggapan serta solusi dari badan usaha milik desa itu sendiri dan juga berbeda dari segi waktu dan tempat yang berbeda. Untuk menggambarkan mengenai pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang terarah dapat memberikan pedoman dan juga membantu pemerintah desa dalam pengelolaan untuk menghasilkan keuntungan untuk desa, serta dalam hal ini BUMDes harus memperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar keuangan yang digunakan. Dan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes seharusnya mengacu pada pedoman umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dalam penelitian ini hal yang menarik peneliti adalah terkait masalah apakah bumdes ataupun bumds panggung lestari yang menjadi penelitian ini dapat menerapkan SAK etap dalam laporan keuanganya apakah ada faktor yang mempengaruhinya, dan juga selain itu hal menarik lainnya sumber daya manusia yang bekerja di bumdes panggung lestari yang dimana memang tujuannya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa panggung harjo, dan yang lebih membuat perhatian peneliti adalah karyawan yang bekerja di rumah pengelolaan sampah yang dimana beberapa karyawan yang di pekerjakan berasal dari panti sosial, karena hal ini yang akan lebih banyak di bahas bagaimana mengubah pola fikir

masyarakat lain dalam melakukan penilaian terhadap sesama, dan juga masalah masalah yang terjadi di setiap unit menarik perhatian peneliti untuk memperdalam faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan yang ada di bumdes panggung lestari.

Dalam penelitian ini akan dilakukan di badan usaha milik desa (BUMDes) Panggung Lestari yang terletak di Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Batul. Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Desa Panggunharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 hektar data didapatkan langsung dari web dan hasil survey bumdes panggung lestari ([www. Panggunharjo.desa.id/Bumdes](http://www.Panggunharjo.desa.id/Bumdes)). Badan usaha milik desa panggung lestari berdiri sejak tahun 2013, badan usaha milik desa salah satunya adalah RPS atau Rumah Pengelolaan Sampah, ada juga usaha pengelolaan minyak jelantah, dan masih banyak lagi. Dari segi bisnis dan profit pencapain terbanyak BUMDes Panggung Lestari adalah usaha rumah makan atau rest area yang ada di jalan Matraman pencapaiannya tahun ini sudah mencapai 5,8 milyar. Alasan peneliti memilih badan usaha milik desa Panggung Lestari karena bumdes panggung lestari berlokasi dekat dengan peneliti dan juga BUMDes Panggung Lestari percontohan BUMDes yang sukses dalam mewujudkan hasil kinerja yang baik dan berpotensi meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa.

Badan usaha milik yang terletak di sewon bantul, Yogyakarta yang dimana bumdes panggung lestari sudah berdiri sejak tahun 2013. Awal pembangunan bumdes panggung lestari belum dapat berjalan dngan semesinya yang dimana dari manajemen dan sumber daya manusia masih kurang efektif hingga beberapa tahun berjalan bumdes panggung lestari sudah dapat memiliki beberapa unit usaha yaitu rumah pengelolaan sampah, pengelolaan minyak jelantah, taman oil, swadesa, dan yang baru terbangun awal 2017 yaitu wisata desa yang dinamakan kampung Mataraman.

Untuk unit usaha pertama rumah pengelolaan sampah atau masyarakat biasanya menyebut KUPAS yang dimana dalam kupas ini mengelola sampah rumah tangga masyarakat panggungharjo, yang dimana beberapa pedukuhan sudah terdaftar di rumah pengelolaan sampah ini, yang dimana sampah yang di ambil di rumah tangga akan di pilih dan di kelompokkan dan seperti sampah organik dan non organik, untuk kupas sendiri sudah ada sejak belum adanya bumdes panggung lestari yang dimana kupas di pimpin langsung oleh pak lurah panggungharjo, yang awal hanya ada 5 orang yang bekrja hingga sampai dengan perkembangan dan beberapa perbaikan dan memiliki tempat sendiri. Tujuan dari kupas ini sendiri awal mulanya bagaimana cara mengurangi sampah-sampah yang ada desa panggungharjo, serta memberikan peluang pekrjaan bagi masyarakat panggungharjo. Dengan saat ini sudah banyak memiliki pelanggan yang cukup dikatakan hampir seluruh pedukuhan sudah terdaftar itu mnggambarkan bahkan hasil kerja yang diberikan kupas memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat.

Untuk pengelolaan limbah cair yang sudah sejak dulu tetapi memang belum terealisasi di bumdes panggung harjo, yang dimana tujuan dari pengelolaan minyak jelantah yang sudah menjadi unit usaha di bumdes panggungharjo adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan minyak secara berulang akan merugikan kesehatan, selain itu juga pengelolaan minyak jelantah memiliki manfaat yang memang bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk bahan campuran solar, oleh karena itu karena pengelolaan limbah cair minyak jelantah ini sudah menjadi unit usaha di bumdes panggung lestari yang dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa pengaruh mengkonsumsi minyak jelantah, hingga masyarakat sendiri yang menawarkan minyak jelantah untuk di jual ke bumdes panggung harjo, untuk pengelolaan minyak jelantah ini bekerja sama dengan PT Danon yang menjadi pemasukan rutin dan meningkatkan pendapatan bumdes panggung lestari.

Unit selanjutnya adalah pengelolaan biji nyamplung yang dimana awal mulanya bumdes panggung harjo berinovasi dan mencari tahu untuk mencari energi alternatif yang dimana sudah banyak yang menggunakan energi dari tanaman seperti kemiri, jarak, ubi dan lainnya tetapi setelah dilakukannya banyak percobaan yang di lakukan hingga menemukan biji nyamplung yang diketahui memiliki banyak kandungan minyak di bandingkan dengan tanaman lainnya yang digunakan sebagai energi alternatif, kandungan minyaknya mencapai 0,5 sampai 0,6 liter per kilo biji nyamplung. Saat itu juga pernah dilakukannya uji coba pada kendaraan sepeda motor yang dimana jarak yang dapat di tempuh dari Purworejo hingga Jakarta menggunakan minyak dari biji nyamplung ini, tetapi ternyata masalah yang terjadi pada saat pemasarannya karena minyak yang di hasilkan biji nyamplung ini kalah perbandingan harga dengan harga BBM pada saat itu. Setelah di uji coba dengan kendaraan berhasil tetapi bermasalah dengan pemasaran bumdes panggung lestari mnemukan manfaat

lain dari biji nyamplung yang dimana minyak dari biji nyamplung baik untuk kesehatan kulit, dan penyuburan rambut, hingga akhirnya bumdes panggung lestari berinovasi menggunakan minyak biji nyamplung untuk bahan kosmetik dan ternyata di lihat dari peluang baik dan setelah di bandingkan juga lebih baik tetapi untuk produk yang dihasilkan untuk saat ini masih sampai proses perizinan pagedaran.

Unit usaha selanjutnya wisata desa yang dimana di bangun warung kampung mataraman yang sudah berdiri sejak tahun 2017 yang dimana awal mulanya kampung mataraman ini tidak memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaannya, karena dari beberapa karyawan juga kurang memiliki kompetensi yang memadai, hingga saat 2018 manajemennya terbentuk hingga kampung mataraman memiliki peraturan dan tata kelola yang baik. Keunggulan yang di tawarkan di kampung mataraman adalah rumah makan yang bernuansa tempo doloe dari segi bangunan, hingga makanan yang di hidangkan memang menggunakan hasil bumi masyarakat desa panggung harjo. Kampung mataraman memiliki peluang besar untuk bumdes panggung lestari karena dari tahun ke tahun sudah jarang sekali rumah makan atau tempat wisata yang menyajikan nuansa tempo dulu dan bahkan sampai ke hidangan yang disajikan, selain itu dalam perencanaan akan ada pasar desa yang dimana penjual atau pedagang asli dari desa panggung harjo.

Unit usaha selanjutnya swadesa yang dimana sudah ada sejak belum terbentuknya bumdes panggung lestari yang dimana pada generasi pertama terjadi kerugian, setelah masuk generasi kedua yang atur oleh berbeda kepemimpinan hingga sudah menjadi salah satu unit usaha di bumdes panggung harjo, yang dimana dalam swadesa ini bumdes memberikan wadah untuk para pedagang yang ada di panggung harjo ada beberapa kategori pedagang tetap yang dimana memang sudah ada sejak puluhan tahun, pedagang tidak tetap yang

biasanya tidak dengan kontrak semisal dalam jangka waktu sebulan, dan juga ada pedagang asongan. Semenjak terbentuknya aturan dan tata kelola yang baik, swadesa ini mengalami peningkatan tetapi memang tidak terlalu yang signifikan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah yang ada di penelitian ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan cukup lama, dan ada beberapa tempat pada saat wawancara tidak pada tempat yang memadai yang berpengaruh ke volume suara yang dihasilkan dalam wawancara., laporan yang diterima hanya laporan keuangan 2017 yang dimana pada saat penelitian bumdes panggung lestari belum mengaplikasikan laporan keuangan untuk tahun 2018, dan bumdes belum memiliki ketentuan yang pasti dalam penerapan standar akuntansi keuangannya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa faktor yang menghambat pertumbuhan atau kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Bagaimana kondisi laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
3. Apakah laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pertumbuhan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Untuk mengetahui apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Mendapat pelajaran dan motivasi untuk mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa masing-masing agar menjadi lebih baik.
2. Dalam proses penelitian narasumber dan informan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bertukar informasi dan pengetahuan baru tentang bagaimana untuk kemajuan BUMDes.
3. Dapat belajar dari kekurangan dan diharapkan menjadi lebih baik untuk mempelajari dan memperbaiki kembali atas kekurangannya hasil penelitian.